

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang Masalah

Pendidikan merupakan salah satu indikator kualitas sumber daya manusia. Berbagai capaian pembangunan dan pertumbuhan negara seperti pertumbuhan ekonomi dan angka harapan hidup bergantung pada kemampuan pikir manusia. Agar dapat menuai manfaat dari capaian tersebut, negara perlu memaksimalkan kemampuan pikir manusia, yakni melalui peningkatan kualitas pendidikan. Tak hanya meningkatkan kemampuan ekonomi, pendidikan juga dapat menggiring bangsa menuju masa depan yang lebih baik. Dengan mewujudkan kualitas pendidikan yang baik, negara juga dapat meningkatkan daya saingnya di ranah internasional. Meski demikian, tidak semudah itu bagi semua negara untuk dapat mencapai kualitas pendidikan yang memadai, khususnya bagi negara berkembang seperti Indonesia.

Komitmen internasional untuk mewujudkan pendidikan berkualitas di seluruh dunia dituangkan dalam *Sustainable Development Goals* (SDG), yaitu agenda pembangunan berkelanjutan global yang dirumuskan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tahun 2015. SDG merupakan agenda lanjutan dari *Millenium Development Goals* yang dirumuskan lima tahun sebelumnya. Di dalam SDG, terdapat 17 tujuan pembangunan yang ditargetkan untuk tercapai di tahun 2030, dimana tujuan-tujuan tersebut telah disepakati seluruh negara anggota PBB. Komitmen dalam mewujudkan pendidikan yang inklusif dan merata turut dimuat dalam SDG (UNDP, 2020).

Keinginan Indonesia untuk mewujudkan kehidupan bangsa yang cerdas telah tercerminkan sejak awal kemerdekaan Indonesia, yakni dengan dituangkannya cita-cita tersebut ke dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Begitu juga halnya dengan sembilan agenda prioritas atau yang disebut dengan Nawacita, yang telah ditetapkan oleh Presiden Republik Indonesia. Salah satu agenda prioritas Nawacita adalah “Meningkatkan Kualitas Manusia di Indonesia”, yang kemudian diwujudkan melalui pengimplementasian

program kementerian dan lembaga terkait. Kegiatan pengimplementasian target pendidikan oleh pemerintah tak lupa juga dilaksanakan secara selaras dengan Sustainable Development Goals nomor 4.

Indonesia adalah negara dengan populasi terpadat keempat di dunia dengan total penduduk lebih dari 260 juta jiwa. Mengingat berbagai kondisi sosioekonomi yang cukup kompleks serta posisi Indonesia sebagai negara berkembang, timbul berbagai macam tantangan dalam mewujudkan kualitas pendidikan di Indonesia. Berbagai kerentanan sosial seperti adanya disparitas ekonomi dan disparitas kualitas pendidikan bermunculan di Indonesia. Salah satu tantangan yang dihadapi oleh Indonesia adalah pelaksanaan wajib belajar pendidikan 12 tahun yang berkualitas masih belum maksimal. Adapun pelaksanaan wajib belajar tidak maksimal yang dimaksud meliputi pelayanan pendidikan dasar dan menengah yang belum maksimal, pendidikan menengah kejuruan yang tidak relevan dengan kebutuhan dunia kerja, hingga proses pembelajaran yang tidak interaktif dan tidak dapat menumbuhkan kreativitas siswa (Kemdikbud, 2020). Selain itu, tercatat bahwa per tahun 2016 satu dari empat penduduk umur 5 tahun ke atas masih bersekolah, sedangkan sisanya tidak atau belum pernah bersekolah dan tidak bersekolah lagi (Badan Pusat Statistik, 2016).

Keadaan yang sama mengenai pendidikan Indonesia dapat dilihat juga menggunakan berbagai indikator internasional seperti tes PISA dan TIMSS. Pada tahun 2015, Indonesia masih menempati peringkat ke-64 dari 72 negara anggota *Organisation for Economic Cooperation and Development* (OECD) yang mengikuti *Programme for International Student Assessment* atau PISA. Adapun PISA adalah penilaian yang dilaksanakan untuk mengevaluasi pendidikan negara-negara melalui serangkaian tes di bidang kemampuan literasi, matematika dan sains. Sejak tahun 2009 hingga 2015, Indonesia selalu berada di peringkat 10 terbawah (Kumparan, 2019). Begitu pula halnya dengan tes *The Trends in International Mathematics and Science Study* (TIMSS) yang diadakan empat tahun sekali, dimana Indonesia juga mendapatkan posisi ke-46 dari total 51 negara peserta (detikNews, 2019). Indonesia harus mengejar ketertinggalan yang cukup jauh, khususnya jika dibandingkan dengan negara Asia Tenggara lainnya.

Salah satu provinsi di Indonesia dengan kualitas pendidikan yang paling rendah, adalah Nusa Tenggara Timur (NTT). Melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 131 Tahun 2015, pemerintah telah menetapkan NTT sebagai salah satu daerah tertinggal untuk periode 2015-2019, dimana daerah-daerah tersebut akan menjadi fokus pembangunan nasional (Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, 2015). Namun, terlepas dari provinsi NTT yang telah menjadi salah satu fokus wilayah pembangunan, tercatat bahwa di tahun 2016, hanya tiga dari empat penduduk usia sekolah (yang berusia 7 sampai 24 tahun) di NTT yang pernah sementara bersekolah. Data tersebut menunjukkan bahwa masih ada seperempat dari total penduduk usia sekolah di provinsi tersebut yang berhenti sekolah, maupun belum pernah sekolah. Begitu pula halnya dengan tingginya jumlah penduduk NTT di atas 15 tahun yang tidak mempunyai ijazah karena tidak pernah mengenyam pendidikan sebelumnya (BPS Provinsi NTT, 2017).

Tak hanya pelajar, kualitas guru juga masih belum memenuhi standar pendidikan. Di tahun 2015, lebih dari 30 persen guru di NTT masih memiliki ijazah D-1 ke bawah (Tempo.co, 2015). Kondisi-kondisi tersebut tentu sangat disayangkan, dan merupakan salah satu dari permasalahan yang harus diatasi agar Indonesia mampu meningkatkan kualitas hidup sumber daya manusia, sebagaimana yang dimuat dalam agenda prioritas. Sudah merupakan suatu keharusan bahwa pendidikan dapat diakses oleh setiap orang tanpa dibatasi oleh usia, jenis kelamin, tempat maupun waktu. Permasalahan terkait kesenjangan kualitas pendidikan di NTT mencerminkan pemenuhan kebutuhan dasar warga negara yang belum sempurna.

Kemajuan pesat dalam dunia hubungan internasional telah memungkinkan kehadiran aktor non-negara untuk turut berpartisipasi dalam mewujudkan berbagai tujuan pembangunan internasional, khususnya di negara-negara berkembang. Berbagai agenda pembangunan yang telah dirumuskan sebelumnya tidak dapat semata-mata memecahkan permasalahan kualitas pendidikan di Indonesia. Kondisi tersebut pun mengundang atensi ChildFund International untuk turut membantu permasalahan pendidikan di Indonesia. ChildFund International adalah sebuah organisasi non-pemerintah yang bertujuan untuk mendukung kesejahteraan anak dan remaja yang bergerak di berbagai bidang seperti

pendidikan, kesehatan, dan lain-lain. Sejak pertama kali berdiri hingga sekarang, ChildFund International tercatat memiliki 24 negara mitra kerjasama. Melalui negara mitra tersebut, ChildFund bekerja melalui perpanjangan tangan yang disebut mitra lokal. Terdapat 261 mitra lokal ChildFund International yang turut membantu dalam menjangkau lebih dari 13 juta anak dan anggota keluarga penerima bantuan dari ChildFund International (ChildFund, 2020).

ChildFund International telah resmi menjadi mitra dengan pemerintah Indonesia sejak tahun 1973. Tepat sebelum kemitraan Indonesia dan ChildFund dijalin, yaitu pada era Orde Baru, target minimum pembangunan pendidikan adalah terwujudnya pengetahuan dan kemampuan dasar tentang membaca, menulis, dan berhitung, serta penggunaan bahasa Indonesia. Pada saat itu, penyelenggaraan pendidikan cenderung bersifat sentralistik dan berorientasikan target untuk pemecahan masalah makro seperti pembangunan ekonomi (Sugiyono, Peta Jalan Pendidikan Indonesia, 2013). Oleh karena itu, kerjasama dengan ChildFund dijalin dengan harapan dapat memperbaiki serta pemeratakan kualitas pendidikan pada saat itu, yang kemudian kemitraan tersebut berlanjut hingga sekarang. Saat ini, ChildFund International bekerja dengan 16 mitra lokal yang berasal dari 177 desa, 31 kabupaten dan 8 provinsi di Indonesia.

Dalam rangka mewujudkan perbaikan kualitas pendidikan di Indonesia, ChildFund International menjalin kerjasama dengan pemerintah Indonesia pada akhir 2016. Kerjasama tersebut ditargetkan untuk rampung pada tahun 2019 serta diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pemecahan masalah pendidikan yang ada Indonesia. Rangkaian program kerja tersebut dilaksanakan di 8 provinsi di Indonesia, dengan NTT salah satu fokus wilayahnya. dengan berkoordinasi dengan pemerintah daerah serta lembaga mitra lokal yang berada di NTT.

Tabel I. 1 Angka Partisipasi Kasar (APK) di NTT Tahun 2018-2019

Jenjang Pendidikan	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)		SD/MI/Paket A		SMP/MTs/Paket B	
	2018	2019	2018	2019	2018	2019
APK	32,58	30,87	116,58	114,95	88,51	87,82

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2020

Namun selama penerapan kerjasama antara ChildFund International dan Indonesia, terjadi penurunan angka partisipasi kasar anak yang mengikuti Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Nusa Tenggara Timur dimana semula berada di 32,58 pada tahun 2018 menjadi 30,57 di tahun 2019. Lalu, terdapat penurunan angka partisipasi kasar peserta didik Sekolah Dasar atau sederajat, yang semula mencapai 116,58 pada 2018 kemudian turun menjadi 114,95 pada 2019. Selain itu, didapati juga penurunan angka partisipasi kasar peserta didik Sekolah Menengah Pertama atau sederajat dari 88,51 di 2018 menjadi 87,82 di tahun berikutnya. Penurunan angka partisipasi kasar pelajar yang bersamaan dengan berlangsungnya program kerja ChildFund International di NTT tahun 2016-2019 tersebutlah yang berhasil menarik perhatian penulis dalam pengambilan topik penelitian ini.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut serta mengingat urgensi kualitas pendidikan sebagai pilar pembangunan dan kesejahteraan hidup di Indonesia, maka signifikansi penelitian ini adalah untuk mengetahui lebih lanjut mengenai kerjasama antara Indonesia dan ChildFund International dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan di Nusa Tenggara Timur pada periode 2016 hingga 2019. Adapun pengambilan wilayah Nusa Tenggara Timur dan periode 2016-2019 sebagai batasan penelitian didasari oleh ditetapkannya Nusa Tenggara Timur sebagai daerah tertinggal oleh pemerintah Indonesia. Penetapan daerah tertinggal kemudian menjadikan wilayah tersebut sebagai fokus pembangunan pada periode tersebut. Sudah merupakan suatu kewajiban bagi pemerintah dan masyarakat umum untuk mengarahkan atensinya pada wilayah yang tentunya membutuhkan bantuan lebih, termasuk di bidang pendidikan. Kiranya penelitian ini dapat menjabar penerapan kerjasama, serta turut

berkontribusi dalam memberikan masukan maupun saran terkait penerapan kerjasama antara Indonesia dan aktor lain dalam bidang peningkatan kualitas pendidikan.

I.2 Rumusan Masalah

Rendahnya kualitas pendidikan di Indonesia dari tahun ke tahun menarik atensi ChildFund International untuk turut bekerjasama dengan pemerintah dalam rangka perbaikan kualitas pendidikan di NTT. Akan tetapi, terlepas dari rangkaian program kerja yang telah diupayakan pemerintah Indonesia dan ChildFund International, tetap ada tantangan dalam mewujudkan peningkatan kualitas pendidikan di NTT. Maka berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, muncul sebuah rumusan masalah yaitu: ***Bagaimana penerapan kerjasama Indonesia dan ChildFund International dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Nusa Tenggara Timur tahun 2016-2019?***

I.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah dan rumusan masalah yang telah dijabarkan diatas, dapat disimpulkan bahwa tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan penerapan kerjasama Indonesia dan ChildFund International dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan di Nusa Tenggara Timur tahun 2016-2019.

I.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

- a. Manfaat teoritis, yaitu agar dapat memberikan pemahaman dan wawasan bagi para pembaca mengenai kerjasama internasional antara negara dan NGO dalam perwujudan pembangunan di bidang pendidikan.
- b. Manfaat praktis, yaitu agar dapat memberikan masukan terhadap pemerintah maupun NGO dalam bekerjasama terkait permasalahan kualitas pendidikan di Indonesia, khususnya di Nusa Tenggara Timur.

I.5 Sistematika Penulisan

BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini membahas pendahuluan penelitian yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat teoritis dan praktis penelitian serta sistematika penulisan penelitian.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini memuat pembahasan mengenai tinjauan pustaka, dimana penulis mencari penelitian terdahulu yang memiliki kesamaan maupun kemiripan topik dengan penelitian ini. Setelah itu, penulis juga menjelaskan kerangka pemikiran, dimana penulis mengambil teori maupun konsep untuk menelaah topik permasalahan yang diambil. Bab kedua juga memuat alur pemikiran serta asumsi dasar penelitian.

BAB III: METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan metode penelitian yang digunakan peneliti guna memaksimalkan hasil akhir penelitian. Selain itu, bab ketiga juga menjelaskan tentang jenis penelitian, jenis data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, serta lokasi dan waktu penelitian.

BAB IV: DINAMIKA PENDIDIKAN DI NUSA TENGGARA TIMUR

Bab keempat menjelaskan tentang sejarah perkembangan pendidikan Indonesia, termasuk kebijakan serta pencapaian yang berhasil diraih Indonesia sejauh ini yang ditinjau melalui beberapa indikator. Selain itu penulis akan membahas mengenai kualitas pendidikan di NTT sebagai fokus penelitian penulis, serta hubungan kerjasama Indonesia dan ChildFund International..

BAB V: PENERAPAN KERJASAMA INDONESIA DAN CHILDFUND INTERNATIONAL DALAM MENINGKATKAN KUALITAS PENDIDIKAN DI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2016-2019

Dalam bab ini, penulis menjawab rumusan masalah yang telah diajukan, dimana fokus pembahasan berada pada proses penerapan kerjasama pemerintah Indonesia dan

ChildFund International dalam meningkatkan kualitas pendidikan di NTT secara terperinci. Penulis juga menjelaskan tentang tantangan dan hambatan yang ditemui selama penerapan kerjasama, serta solusi dalam mengatasinya.

BAB VI: PENUTUP

Bab ini memuat kesimpulan dari bab-bab sebelumnya, disertai dengan saran dari penulis terkait topik penelitian yang diambil.